

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Integrasi nasional menjadi hal yang kompleks untuk dicapai ketika berbicara mengenai Prancis sebagai negara modern. Revolusi Prancis (1789-1799) menjadi peristiwa monumental yang melekat dan diingat bagi setiap orang Prancis, karena menjadi titik mula perubahan struktur dan tata kelola negara. Prancis modern dimulai ketika berdirinya Republik Prancis dan prinsip “*Liberté, Egalité, Fraternité*” hadir sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan absolutisme monarki dan feodal selama lebih dari satu abad lamanya.

Fenomena imigrasi yang terjadi telah secara signifikan mempengaruhi idealisme nilai-nilai republik di Prancis. Sejak akhir abad ke-19, hingga pertengahan abad ke-20, Prancis mengalami beberapa gelombang migrasi massal yang berkontribusi terhadap perubahan struktur demografis dan kondisi ekonomi negara secara makro.

Dalam sejarahnya, terjadinya gelombang imigrasi di Prancis tersebut dapat dibagi ke dalam dua fase utama. Pertama, imigrasi pasca-Revolusi Prancis (1789-1799), tepatnya pada periode industrialisasi, di mana imigran yang datang didominasi oleh imigran-imigran asal sesama negara-negara Eropa seperti Belgia, Spanyol, dan Italia. Kedua, imigrasi pasca-Perang Dunia II (1946-1974), tepatnya pada periode *Les Trente Glorieuses*, yang mana pada fase ini mayoritas imigran adalah berasal dari negara-negara bekas koloni Prancis, terutama dari kawasan Afrika Sub-Sahara dan Maghribi (Aljazair, Maroko, dan Tunisia). Sebagian imigran yang datang ke Prancis tersebut diproyeksikan untuk bekerja di sektor-sektor industri strategis di kawasan-kawasan perkotaan Prancis (Hargreaves, 1995b).

Perubahan tren latar belakang imigran tersebut kemudian juga mempengaruhi meningkatnya kondisi multikultural di Prancis. Meskipun pada awalnya keberadaan imigran menjadi keuntungan bagi Prancis melalui laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada masa *Les Trente Glorieuses* tersebut, tetapi secara historis Prancis tidak pernah mengakui keberagaman berdasarkan etnis atau agama seseorang. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ide-ide republik yang mengedepankan universalisme dan penerapan prinsip sekularisme ekstrem (*laïcité*), telah eksplisit menegaskan penilaian individu berdasarkan meritokrasi, alih-alih berdasarkan identitas ras atau etnis.

Selama dimulainya arus masuk imigrasi pada akhir abad ke-19, Prancis mulai mengembangkan pendekatan kebijakan yang mendukung proses integrasi nasional dengan menggunakan model asimilasi. Model tersebut berusaha untuk menghapus perbedaan budaya, serta berharap bahwa imigran dapat mengadopsi budaya tunggal di Prancis sebagai *common culture* (Regout, 2011). Pada awalnya, integrasi dengan pendekatan asimilasi berjalan relatif berhasil ketika diimplementasikan kepada imigran-imigran yang berasal dari negara-negara Eropa. Akan tetapi, model pendekatan tersebut mulai dipertanyakan relevansinya ketika memasuki pertengahan abad ke-20, di mana imigran yang berasal dari kawasan Afrika Sub-Sahara dan Maghribi membawa identitas budaya, termasuk agama yang sepenuhnya berbeda dari yang ada di Prancis.

Asimilasi dinilai tidak lagi relevan dan efektif dalam menjalankan proses integrasi nasional. Hal tersebut justru menciptakan ketegangan antara masyarakat asli Prancis dengan imigran, terutama setelah peristiwa Krisis Minyak tahun 1973, yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi di Prancis secara luas.

Perdebatan lalu muncul terkait permasalahan yang ditimbulkan karena ketidakadilan dalam lingkungan yang melibatkan imigran, serta kaitannya dengan integrasi nasional. Pasalnya, proses integrasi di Prancis menjadi krusial mengingat negara tersebut menganut asas kewarganegaraan *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir), sehingga memungkinkan generasi kedua hingga seterusnya dari imigran yang lahir di Prancis akan mendapatkan kewarganegaraan Prancis.

Pemerintah lalu mendorong proses integrasi terhadap imigran melalui bidang pendidikan dengan mewajibkan sekolah dasar bagi semua anak-anak, termasuk bagi mereka yang statusnya adalah keturunan imigran. Hal tersebut dinilai menjadi cara efektif dalam menurunkan pemahaman akan bahasa dan nilai-nilai kebangsaan Prancis. Selain melalui cara pendidikan formal, pemerintah juga berupaya meningkatkan partisipasi orang-orang dalam kegiatan olahraga, terutama sepak bola.

Sejak dimulainya kompetisi resmi sepak bola nasional oleh FFF tahun 1932, telah banyak pemain-pemain sepak bola profesional Prancis yang merupakan para keturunan imigran. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan berhasil menjadi perwakilan Prancis dalam tim tim nasional pada ajang-ajang internasional. Beberapa di antara mereka yang menjadi ikon dan dianggap sebagai *generational talent* antara lain adalah Raymond Kopa, Michel Platini, Zinédine Zidane, serta Kylian Mbappe (Spiro, 2020)

Les Bleus, sebutkan untuk tim nasional Prancis, merupakan cerminan dari realitas masyarakat multikultural di Prancis. Tim yang terdiri dari pemain-pemain

keturunan dari Afrika hingga Arab tersebut berhasil mencetak prestasi-prestasi yang istimewa bagi Prancis, terutama ketika menjadi juara pada dua edisi Piala Dunia FIFA, tahun 1998 dan 2018. Slogan "*black-blanc-beur*", yang menunjukkan citra keberagaman tim menjadi simbol persatuan masyarakat Prancis melalui sepak bola (Kassimeris, 2011).

Sepak bola telah menjadi instrumen efektif bagi keturunan imigran di Prancis mengubah kondisi hidup mereka. Partisipasi yang setara dalam sepak bola berfungsi sebagai instrumen promosi integrasi nasional, dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dengan mengakui identitas setiap individu, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kohesi sosial dan memastikan hadirnya kesempatan yang setara terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ras, etnis, serta agama.

